

PEMETAAN LEMBAGA KERJASAMA REGIONAL DI JAWA TENGAH

Oleh : Hardi Warsono

Abstract : This research aims to elaborate on the various forms of regionalization and the regional cooperation institutions in Central Java. The focus of this research, cooperation between neighboring regions (subsequently addressed as regional cooperation), is one of the numerous forms of inter-regional cooperation. Other forms include cooperation between non- neighboring regions, multilateral regional cooperation and so forth. This research was able to map the existence of various regionalization and regional cooperation institutions. There are eight (8) regions initiated by the province, which were known as Priority Territory (Based on Provincial Regulation number 21 of the year 2003, about Area Zoning). Constructing the future model of institution, the objectives of the cooperation should indicate as a set of rules which facilitates every actor in the cooperation to be involved and be oriented towards a comprehensive program, scope of the cooperation should be wide - ranging, i.e include economic and non economic cooperation (public service). Format of the institution should be developed gradually from sectoral accepted principles and funds should be shared equally and fairly among all participating members.

Keywords : Regionalization, Inter Regional Cooperation.



Pendahuluan

Manajemen penyelenggaraan pembangunan dengan pendekatan teritorial menitik beratkan pada penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi eforia pembangunan baru setelah berakhirnya masa orde baru. Tata penyelenggaraan pemerintah menurut undang-undang no. 32 tahun 2004, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah (Pasal 2 ayat (1)).

Sistem penyelenggaraan pemerintah demikian tidak banyak memberikan ruang bagi penyelesaian isu-isu regional. Hal ini mendapat penegasan juga pada penjelasan Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Pasal 2 ayat (4) huruf a, tentang pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota), dunia usaha dan masyarakat. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, mekanisme perencanaan

dilakukan melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dalam sistem perencanaan pembangunan tersebut hanya dilakukan pada tingkat kelurahan, Kecamatan, dan Forum SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga tidak secara jelas memberikan tempat bagi forum perencanaan pembangunan kewilayahan perbatasan yang membutuhkan kebijakan regional.

Kebijakan desentralisasi dalam UU No. 32 tahun 2004 dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian dan daya saing daerah, namun otonomi daerah disisi lain juga berpotensi menyuburkan egoisme lokal yang kontra produktif dengan kebutuhan kebijakan regional.

Mekanisme egoisme lokal nampak dari kemunculan eksklusivisme masing-masing daerah bukannya *inklucivisme* yang kemudian bisa melihat kepentingan bersama-sama yang terangkum dalam isu-isu kolektif.

Banyak situasi konflik yang menyangkut beberapa kabupaten/kota yang kemudian dapat dijadikan pijakan kerjasama. Sebagai contoh kasus misalnya di wilayah metropolitan Semarang (mencakup Kota Semarang), Kabupaten Kendal, Demak dan Kabupaten Semarang). Di wilayah metropolitan Semarang ini terdapat beberapa potensi konflik antar kabupaten/kota antara lain : air bersih, persampahan, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir dan pengelolaan limbah.

Pada masa orde baru kota Semarang memanfaatkan mata air di wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang sebagai air baku untuk wilayah Kota Semarang, meski dengan kesepakatan tetapi tanpa imbalan berarti. Pada era otonomi, pemanfaatan tanpa imbalan tidak dapat lagi diterima oleh pemilik sumber air. Antara daerah bersitegang merasa benar. Konflik pemanfaatan air ini semestinya bisa dijadikan pijakan kerjasama regional dengan melakukan kegiatan : a) survei bersama sumber air baru dan manajemen bersama antara 3 daerah yakni : Kota Semarang b) Penyusunan Kesepakatan sistem manajemen pengelolaan dan distribusi air bersih antara 2 daerah, yakni : Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang.

Kawasan perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal mendapat limpahan sampah dari kegiatan industri yang berada pada kawasan tersebut. Kabupaten Kendal sering mendapati pembuangan sampah ilegal dari Kota Semarang ke tempat pembuangan sampah di wilayah Kabupaten Kendal.

Penjajagan kerjasama dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah bersama antara 2 daerah, yaitu : a) Kota Semarang dan kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal memiliki lahan untuk menampung dan mengolah sampah menjadi pupuk, tetapi terkendala volume menjadi pupuk, tetapi terkendala volume sampah yang kurang dibanding keperluan mesin pengolah. Sementara itu, tempat pembuangan sampah Kota Semarang tak lagi mampu menampung produksi sampah kota yang semakin padat, b) penjajagan pembuatan briket dari sampah dengan bahan baku dari seluruh wilayah regional metropolitan Semarang (Kendal, Demak dan Kab. Semarang).

Persaingan investasi perumahan dan pemukiman antara dua atau lebih wilayah kabupaten/kota, menyebabkan penerapan



standard lingkungan yang berbeda, dan cenderung pada kompetisi tidak sehat, yang berpotensi merusak lingkungan. Kerjasama kebijakan bersama penetapan standard kualitas lingkungan dan fasilitas permukiman bagi investor di daerah perbatasan (kota Semarang, Kabupaten Demak, Kendal dan kabupaten Semarang) menjadi kebutuhan.

Pelestarian hutan yang membutuhkan dana banyak tidak dapat dilakukan sendiri oleh daerah atas (Kabupaten Semarang) yang tidak merasakan dampak negatif. Daerah atas perlu dukungan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Penjajagan kesepakatan pemeliharaan kelestarian alam bisa dilakukan antara 4 daerah, yakni : Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak dan Kab. Semarang, yaitu : Sungai babon sering meluap dan menyebabkan bankir. Banjir sering melanda wilayah kota semarang, dan Demak. Sering saling melempar kesalahan antara ke tiga wilayah menjadikan konflik berkepanjangan. Kerjasama pengendalian banjir bisa dilakukan bersama antara 3 daerah, yakni : Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kab. Demak yang sama-sama dilalui sungai Babon.

Limbah seringkali mencemari aliran sungai yang menembus batas wilayah administrasi kabupaten/kota. Pencemaran ini dapat dikendalikan dengan penerapan peraturan daerah (perda) terkait manajemen limbah. Kerjasama dapat dilakukan melalui penyusunan Perda bersama tentang : Pengawasan pembuangan air limbah dan penanganan pencemaran.

Sejak otonomi daerah mengemuka, pelaksanaan pembangunan cenderung dilaksanakan sendiri-sendiri oleh kabupaten / Kota masing-masing (lokalism). Sinergitas antar wilayah cenderung berhenti. Sebagian masyarakat menilai bahwa manajemen regional yang diwadahi oleh berbagai lembaga kerjasama regional tidak efektif. (pokok-pokok kesimpulan Seminar Regional Kerjasama Antar Daerah, kerjasama MAP UNDIP dengan Pemkab Pekalongan, di kaje, April, 2005). Oleh karenanya, dirasa perlu untuk mengurangi ego daerah dan meningkatkan sinergitas antar daerah melalui *regional management* dan *regional marketing*.

Perlunya penyusunan program regional selain karena kuatnya ego daerah juga karena ego sektoral. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mengurangi dominasi dari ego daerah dan program-program sektoral, sehingga pendekatan sektoral justru diharapkan lebih bersifat mendukung program-program regional.

Kerjasama antar kabupaten kota di Jawa Tengah sebenarnya telah lama digagas. Hal ini nampak pada adanya berbagai macam forum kerjasama atau sekedar koordinasi kewilayahan. Di Jawa Tengah secara umum terdapat 2 kategori kelembagaan wilayah yakni:

- a. Badan Koordinasi Lintas Wilayah (Bakorlin), yakni kelembagaan yang dibentuk Pemerintah Provinsi secara struktural administratif (merupakan eks karesidenan) yang bertujuan mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan antar kabupaten/kota. Pembentukan wilayah seperti ini lebih bersifat regionalisasi sentralistik.
- b. Kerjasama antar daerah yang merupakan kawasan prioritas, berdasarkan Perda 21/2003 tentang RT RW Jateng : (1) Kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Cilacap dan Kebumen); (2) Kawasan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung); (3) Kawasan Subosukowonosraten

(Surakarta, Boyolali, Sukorejo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten); (4) Kawasan Banglor (Rembang dan Blora); (5) Kawasan Wanarakuti (Juwana, Jepara Kudus, dan Pati); (6) Kawasan Kedungsapur (Kendal, Demak Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi); (7) Kawasan Tangkallangka (Batang, Pekalongan, Pemalang dan kajen); (8) Kawasan Bergas (Brebes, Tegal dan Slawi).

Selain ke dua kategori bentuk lembaga tersebut, muncul lembaga kerjasama yang muncul sendiri-sendiri meliputi beberapa kabupaten Kota, seperti Banjarkebuka (Banjarnegara, Kebumen dan Pekalongan), Sampan dan lain sebagainya. Keberdaannya belum teridentifikasi dengan baik, demikian pula program kerja dari lembaga kerjasama regional tersebut pada umumnya belum terealisasi berjalan baik. Untuk dapat melihat dengan jelas kinerja kerjasama regional tersebut sebagai wahana resolusi konflik antar daerah sangat diperlukan informasi tentang lembaga dan kegiatan yang telah dilakukan. Untuk inilah salah satu tujuan penelitian ini dilakukan.

Permasalahan stagnasi kerjasama regional di Jawa Tengah, dapat diidentifikasi antara lain :

- a) Kerjasama regional yang dulunya dibentuk secara sentralistik beberapa diantaranya ditengarai telah mengalami perkembangan bentuk. Beberapa diantaranya mulai menampakkan ciri-ciri kerjasama regional desentralistik, sebagian lain masih seperti kondisi awal (masih kondisi stagnan).
- b) Program-program pembangunan dalam wilayah kerjasama regional sebagian besar masih belum dapat diimplementasikan.
- c) Banyak masalah lintas daerah tidak dapat ditangani dan cenderung dibiarkan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (i) Bagaimanakah peta lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah? (ii) Bagaimana dinamika kerjasama regional di Jawa Tengah? Dan (iii) Apa permasalahan utama dalam pengembangan lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah? Adapun tujuan Penelitian adalah : (i) Mempetakan berbagai kelompok kerjasama regional di Jawa Tengah; (ii) Mendeskripsikan dinamika kerjasama regional di Jawa Tengah; dan (iii) Mengidentifikasi permasalahan dalam pengembangan kerjasama regional di Jawa Tengah.

Sebagai landasan pembahasan penelitian, diperlukan pengkajian teori yang paling tidak meliputi landasan pemahaman berbagai konsep yang dipergunakan dalam penelitian dan penjelasan kaitan antar fenomena dalam penelitian. Berikut beberapa pemahaman konsep dasar yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Pengertian Region dan Regional. Kata *region*, *regent*, *regency*, *regim* (Bahasa Inggris) berasal dari kata "*rege*" dalam bahasa latin yang berarti: memerintah, mendominasi, atau menguasai. Dalam bahasa Indonesia, region ini biasa dipergunakan padanan kata dari wilayah. Bagian tertentu dipermukaan bumi dengan batas dan karakteristik tertentu bisa disebut wilayah.

Kata Kawasan dipergunakan untuk menunjuk pada wilayah dalam batas yang ditetapkan berdasarkan fungsi tertentu, misalnya kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan pusat kota,

dan lain sebagainya (Hadjisaroso, 1981). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang mengartikan kawasan sebagai "wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya". Sedangkan arti kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian tersebut wilayah jelas diidentifikasi dari fungsi dan nilai.

Teori Regionalisasi atau konsep pembangunan berbasis wilayah dimulai dari teori paling klasik Richardson; Hangget, Cliff dan Frey (Rustiadi dkk, 2004). Kawasan (*regions*) didelineasi berdasarkan konsep kesamaan (*homogenitas*) tertentu menjadi 3 kategori, yaitu : *Homogeneous region, nodal region, planning region* (Richardson, 1977). :

- a) ***Homogeneous regions*** : berdasarkan pada homogenitas yang secara geografis terdapat pada daerah-daerah yang secara bersama-sama dikaitkan menjadi satu daerah tunggal dengan ciri-ciri seragam/dapat bersifat ekonomi (struktur produksi , pendapatan perkapita, dan pola konsumsi), atau geografis: topografi dan iklim ataupun politik. Karenanya muncul (pengertian daerah tanpa ruang (*spaceless*), yang batas homogenitas sulit ditentukan.
- b) ***Nodal regions*** : didasarkan pada sifat perekonomian yang tidak homogen (misalnya karena aglomerasi kegiatan ekonomi). Istilah-istilah yang muncul : *nodal region, polarized region* atau *functional region*. Daerah nodal terdiri dari kesatuan-kesatuan yang heterogen, misal : kota besar, sedang dan kecil
- c) ***Planning region*** : yakni daerah yang didelineasi karena batas batas wilayah administrasi.

Perbedaan makna antara wilayah dan region dapat dijelaskan sebagai berikut. Istilah wilayah merujuk pada sebuah batasan ruang geografis tanpa batasan yang pasti, seperti misalnya wilayah budaya, wilayah tandus, wilayah iklim tropis dan sebagainya. Sedangkan istilah region dipergunakan untuk menyebut ruang geografis yang menunjukkan keterlibatan ruang (*spatial*) beberapa wilayah administratif, baik sebagian maupun seluruhnya. Istilah regional secara etimologis merupakan kata bentukan dari regio (n), berupa kata sifat yang berarti kewilayahan, dan regionalisasi adalah proses pembentukan region.

Kawasan dimaknai sebagai sebuah batasan ruang yang didominasi oleh fungsi batasan ruang yang didominasi oleh fungsi tertentu, misalnya : kawasan industri, pariwisata, hutan lindung dan sebagainya.

Dalam penelitian ini istilah kawasan yang banyak digunakan adalah kawasan kerjasama regional, bukan kawasan regional yang lebih mengacu ke homogeneous region.

Manajemen Regional (MR). Regionalisasi dapat terbentuk dari proses politik dan dapat dipengaruhi oleh paradigma pembangunan yang digunakan. dalam kerangka otonomi dan tekanan globalisasi, regionalisasi mendapatkan relevansinya.

Abdurrahman (2004) mengemukakan bahwasanya sebagai fenomena pembangunan nasional, regionalisasi dapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari tekanan globalisasi dan implikasi

permasalahan intern (nasional) yang diantaranya akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, meskipun negara yang sentralistik (seperti Cina dan Vietnam) pun mempraktekkan regionalisasi. Dalam pemahaman sistem kota-kota kita, terjadi simpul-simpul atau pusat pertumbuhan sehingga muncul istilah wilayah kota, metropolitan area, atau mega urban telah berubah akibat konteks global. Kini kota kita tidak saja mendominasi perannya sebagai pusat pertumbuhan (*growth center*) saja, tetapi beralih menjadi bentuk region, dimana terjadi kerjasama antara kota dengan wilayah sekitarnya.

Regionalisasi telah terjadi sebagai anti klimaks dari tekanan globalisasi. Dengan globalisasi, daerah otonom tidak cukup merasa kuat melakukan pembangunannya sendiri (*exclusive*). Setiap daerah pasti merasakan atau memiliki keterbatasan dan dominasi fungsinya yang terikat pada sistem regional untuk sinergitas (Weichhart, 2002).

Proses Regionalisasi : Sentralistik vs Desentralistik. Weichhart (2002) dalam Abdurrahman (2004) lebih lanjut menegaskan bahwa perkembangan dan proses globalisasi struktur *real economy* semakin memperkuat keberalihan ke regional, artinya hanya region sebagai lokasi strategis yang dapat memiliki keunggulan komparatif dan dapat menekan biaya tinggi karena interaksi sosio-ekonomi dapat terstruktur dan tumbuh efisien.

Pada dasarnya terdapat dua jenis proses regionalisasi yaitu : regionalisasi sentralistik dan regionalisasi desentralistik. Pada regionalisasi sentralistik, faktor kewenangan yang bersifat *direktif-koordinatif* merupakan komponen kuat dan dimiliki oleh lembaga otoritas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui prosedur direktif (struktural-hirarkis). Perencanaan dan pembangunan dilakukan pada kelembagaan regional saat ini. Pada proses pembentukan eks karesidenan yang sekarang bernama Bakorlin (Badan Koordinasi Lintas Kab/Kota), yang terdiri dari beberapa daerah administratif dapat terlaksana karena mekanisme formal struktural - administratif terbentuk atas landasan perintah (*ex mandato*) berdasarkan kepentingan pemerintah tingkat atas (Provinsi)

Pada region dalam konteks heterarkis sebagai produk regionalisasi desentralistik, mestinya proses pembentukan didasari pada kehendak sendiri (*ex mera motu*) atau inisiatif lokal dari stakeholders regional. Menilik sejarahnya, kawasan prioritas di Jawa Tengah yang mestinya berlandas *ex mera motu*, diawali dengan mandat provinsi melalui Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 21/ tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah. Hal ini berarti dapat menjadi kerancuan semangat desentralistik dari sentralistik pada start awalnya. Sebagai region hasil regionalisasi desentralistik, kawasan kerjasama regional Jawa Tengah yang terwadahi dalam kawasan prioritas, perlu berusaha memperlihatkan ciri-ciri utamanya yang meliputi:

- 1) Batasan keruangan bersifat dinamis dan tidak menggambarkan garis batas statis dan tertutup. Dalam konteks management kewilayahan garis ini ditentukan melalui batasan wilayah administratif (landasan ruang)
- 2) Potensi unggulan dan kekuatan endogen menjadi latar belakang dan merupakan modal dasar pelaksanaan (pondasi) kegiatan
- 3) Aktor regional menjadi motor bagi terbentuk dan bekerjanya sebuah wadah kerjasama lintas daerah (*platform*)

- 4) Aspek komunikasi, kerjasama, dan koordinasi selalu mendominasi pelaksanaan kesepakatan bersama/ komitmen (pilar kegiatan).
- 5) Adanya tujuan dan sasaran bersama untuk mewujudkan pembangunan (visi dan target).

Metoda Penelitian

Penelitian ini bertipe eksploratif, yakni menggali informasi sebanyak mungkin tentang fenomena yang masih dalam suasana kabur, yakni keberadaan lembaga kerjasama sebagai evolusi dari regionalisasi tata ruang ke dalam dominan manajemen regional. Kekaburan ini berimplikasi pada kesulitan kabupaten/kota lain yang ingin mereplikasi proses evolusi manajerial tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian : studi kasus dari Robert K. Yin (2004)

Informasi sebagai tata penelitian diperoleh dari beberapa informan yang dirunut dari beberapa pelaku kerjasama antara lain:

- (a). Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.
- (b). Pejabat pelaksana pendampingan kerjasama pada Bappeda Provinsi.
- (c). Staf pelaksana pendampingan kerjasama regional di Bakorlin, dan
- (d). Regional Manager Lembaga Kerjasama Antar Daerah.

Metode pengumpulan data dilakukan teknik triangulasi wawancara mendalam, observasi serta, penelaahan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan tabel tunggal dan format analisis Taksonomi. Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survei, sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, FGD dan Observasi dilakukan analisa dengan metode analisis yang dikenalkan Miles dan Huberman (1992) sebagai *Operational component*.

Kualitas Penelitian (*goodness criteria*), meliputi:

- a) Penggunaan teknik pengumpulan data fleksibel, tidak terpaku pada 1 jenis pengumpulan data tertentu, atau dengan kata lain dimungkinkan menggunakan triangulasi teknik. Teknik dapat diperkaya dengan perkembangan kasus di lapangan.
- b) Identifikasi dan pemetaan lembaga kerjasama belum pernah dilakukan sehingga diharapkan memiliki kemanfaatan praktis.
- c) Secara teiritis kajian manajemen regional belum banyak dilakukan di jurusan administrasi publik, sementara dinamika kerjasama antar daerah di era otonomi daerah begitu cepat berubah seiring perubahan paradigma pelaksanaan pembangunan regional termasuk di dalamnya manajemen kerjasama antar daerah.

Keterbatasan Penelitian : bagi penelitian yang tidak terbiasa dengan fleksibilitas metode, penelitian dengan model triangulasi nampak membingungkan dan tidak konsisten.

Peta Regionalisasi dan Lembaga Kerjasama Regional di Jawa Tengah. Berdasarkan pendekatan awal, regionalisasi di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan konsep keruangan. Peneguhan akan pengguna konsep tata ruang dalam regionalisasi ini dapat dirunut dari payung hukum regionalisasi di Jawa Tengah, yakni Perda Jateng nomor 21/2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah. Perda ini menjadi pijakan operasional kelembagaan regional di Jawa Tengah. Kawasan yang dibentuk ini diharapkan dapat digunakan sebagai forum komunikasi. Beberapa diantaranya kemudian berubah menjadi sekretariat bersama (kedungsepur dan Sunosukawonosraten). Kawasan regional yang terbentuk diprakasai sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi dengan membagi habis wilayah Jawa Tengah menjadi 8 region. Regionalisasi ini secara konseptual lebih mendekati ciri-ciri regionalisasi sentralisasi, yakni pembentukan sepenuhnya oleh pemerintah lebih atas. Pada perkembangannya mulai sekitar tahun 2004 - 2005 konsep keruangan mulai berubah ke konsep regional management yang lebih fokus pada pengembangan ekonomi melalui pemasaran potensi bersama (*regional marketing*). Selengkapnya lembaga-lembaga ini secara berurutan meliputi:

a. Regionalisasi bentukan tataruang

Berdasarkan Perda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor 21 / 2003 tentang RTRW Jateng, wilayah Jawa Tengah terdiri dari 8 region/ kawasan, yakni:

- 1) Kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)
- 2) Kawasan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang dan temanggung)
- 3) Kawasan Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukorejo, Karang anyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)
- 4) Kawasan Banglor (Rembang dan Blora)
- 5) Kawasan Wanarakuti (Juwana, Jepara Kudus, dan Pati)
- 6) Kawasan Kedungsapur (Kendal, Demak Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi)
- 7) Kawasan Tangkallangka (Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kajen)
- 8) Kawasan Bergas (Brebes, Tegal dan Slawi)

b. Lembaga Kerjasama bentukan era otonomi daerah

- 1) Banjarkebuka (Banjarnegara, Kebumen dan Pekalongan)
- 2) Sampan (Sapta Mitra Pantura)

c. Lembaga Kerjasama regional dalam perintisan (tahun 2007):

- 1) Bolodemang (Blora, Demak dan Rembang) yang dirintis Bappeda Jawa Tengah bersama Bakorlin I
- 2) Purwomanggung dengan meninggalkan Magelang dan menambah Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen, yang dirintis Biro Kerjasama bersama Bakorlin II

Dinamika Lembaga Kerjasama di Jawa Tengah. Pandangan tentang dinamika manajemen Lembaga Kerjasama Regional di Jawa Tengah diwakili oleh 21 Kabupaten/kota dari 25 kabupaten/kota yang telah tergabung dalam lembaga kerjasama regional. Sebanyak 25 Kabupaten/kota dari 35 kabupaten/ Kota di Jawa Tengah telah terikat kesepakatan bersama untuk membentuk lembaga kerjasama regional.

Artinya di Jawa Tengah ada 10 Kabupaten/Kota yang belum tergabung dalam kelembagaan kerjasama regional. Dinamika lembaga ini dijabarkan dari kapasitas lembaga dalam berbagai pihak pada konsep MR (Manajemen Regional) dan keterlibatan berbagai pihak pada penyusunan Visi dan Misi. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

2.1. Kapasitas Lembaga Kerjasama Regional dalam berbagai kegiatan *Investasi Daerah*. Pada umumnya daerah yang tergabung dalam lembaga kerjasama regional menilai positif keberadaan lembaga tersebut. Hal ini nampak dari besar persentase daerah yang menilai bahwa kapasitas lembaga tersebut cukup memadai dalam mendatangkan investasi daerahnya. Namun masih ada sebesar 14.3 % daerah yang menilai lembaga kerjasama tidak memadai dalam merealisasikan investasi. Hal ini terjadi karena memang masih ada lembaga kerjasama yang baru bergerak dalam koordinasi, tetapi belum melakukan kerjasama riil, misalnya Kedungsepur baru menuju ke arah manajemen regional. Selama ini masih berupa sekretariat bersama. Belum banyak kerjasama riil yang dilakukan kecuali *workshop* untuk kerjasama berbasis manajemen regional yang benar.

Promosi Bersama. Lembaga kerjasama regional cukup efektif dalam melakukan promosi daerah. Hal ini telah sesuai dengan konsep dikembangkannya regional manajemen seperti diinstitusikan semula melalui program Red SP (*Regional Economics Development Strategic Plan*). REDSP ini juga disebut PROSPEK (Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kewilayahan). Program ini merupakan sebuah instrumen pembangunan wilayah untuk mendukung terciptanya program-program strategis dalam upaya mengembangkan sumberdaya ekonomi yang berbasis pada keunggulan dan karakteristik wilayah, didukung oleh sinergitas program dan kemitraan yang bersifat lintas daerah serta lintas pelaku (Sumber: Pedoman REDSP). Dari konsep tersebut, *regional marketing* menjadi fokus utama lembaga kerjasama regional yang telah terbentuk di Jawa Tengah.

Pemasaran. Seperti halnya kegiatan promosi bersama, semua responden menilai bahwa pemasaran telah cukup efektif dilakukan oleh lembaga kerjasama regional yang ada. Lembaga kerjasama seperti Sampan, Barlingmascakeb dan PT Solo Raya Promosi memfokuskan kegiatan pada aktivitas ini. Hal ini juga senada dengan jawaban Gubernur dalam Suara Merdeka, 12 Juli 2005 menjelaskan aktivitas Sampan sebagai berikut: "menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas Agro Sapta Mitra Pantura di tujuh kabupaten/kota dan berbagai kota lain di Jawa Tengah termasuk Soropadan, dan Kabupaten Temanggung".

Pembangunan Infrastruktur. Dari lembaga kerjasama yang ada hanya Kedungsepur yang tidak fokus pada regional marketing. Pada lembaga kerjasama regional yang lain, penilaian pada kerjasama pembangunan infrastruktur jelas mendapatkan penilaian kurang. Sebanyak 42,9 % responden memberikan penilaian tidak memadai. Responden lainnya terkesan berbasa-basi memberikan penilaian cukup memadai dan sangat memadai. Hal ini sangat terlihat bila dicermati platform lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah yang ada belum ada yang berbasis pada pelayanan publik, termasuk

pembangunan infrastruktur. Satu-satunya kelembagaan kerjasama yang ada pada pembangunan infrastruktur adalah Banjarkebuka yang telah berakhir dengan telah terbangunnya jalan regional antara Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pekalongan. Sementara satu-satunya lembaga yang belum berkonsep ke arah regional marketing yakni Kedungsepur baru bersifat koordinasi pembangunan belum ada kegiatan pembangunan riil bidang pelayanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur.

Mengatasi Masalah Antar Daerah. Pada umumnya efek psikologis dari adanya ikatan dalam lembaga kerjasama regional berdampak pada penilaian daerah tentang kapasitas lembaga dalam mengatasi masalah antar daerah. Hanya 14,3 % yang menilai bahwa kapasitas lembaga kerjasama dalam mengatasi masalah antar daerah tidak memadai. Selebihnya memberikan penilaian positif pada kapasitas lembaga pada masalah ini.

2.2 Pengetahuan pelaku kerjasama tentang konsep manajemen regional

Pengetahuan Pelaksana Di Daerah. Pelaksana daerah dalam struktur organisasi lembaga kerjasama umumnya terwadahi dalam forum Regional yang terdiri dari para Bupati dan Walikota serta Dewan Eksekutif ataupun Sekretaris Bersama yang dikelola oleh Sekda, asisten I tatapraja, bagian Pemerintahan, dan Bappeda. Konsisten dengan penilaian daerah terhadap kapasitas lembaga kerjasama, responden menilai bahwa sebagian besar pelaksana daerah cukup memadai pemahamannya tentang konsep manajemen regional. Hanya 14,3 % yang memberikan penilaian bahwa pelaksana daerah belum atau tidak memadai pemahamannya tentang konsep MR. hal ini akan dapat dengan mudah dipahami karena tidak semua lembaga kerjasama yang ada telah menerapkan konsep MR dalam manajemennya, misalnya Kedungsepur.

Pengetahuan Pelaksana Lembaga Kerjasama. Pelaksana lembaga Kerjasama Regional dalam struktur kelembagaan Kerjasama Regional umumnya dikenal dengan Regional Manajemen yang terdiri dari 2 atau 3 divisi dan beberapa staf. Ada 42,9 % responden yang memberikan penilaian bahwa pelaksana lembaga kerjasama regional tidak memadai pemahamannya pada konsep MR. Selebihnya (57,1 %) dinilai cukup memahami. Tidak satu persennya yang memberikan penilaian sangat memadai atau sangat tidak memadai. Penilaian tentang pemahaman konsep MR pada pelaksana lembaga kerjasama regional ini lebih rendah daripada pemahaman pelaksana daerah.

Pengetahuan Pelaku Usaha. Lebih rendah dari pemahaman pelaksana daerah dan pelaksana lembaga kerjasama regional merupakan hasil responden pada pelaku usaha pada pemahaman konsep MR. Sebagian besar (57,1%) pelaku usaha tidak memadai pemahamannya pada konsep MR, sisanya (42,9 %) diberi nilai cukup memadai pemahamannya pada konsep MR. Apabila penilaian responden ini benar, tugas regional manager menjadi berat dalam merajut langkah bersama pemerintah dan pelaku usaha mempromosikan daerah-daerah yang tergabung dalam kerjasama.

Pengetahuan Investor. Dalam wawancara, manajer Sampan mengeluhkan minimnya pengetahuan calon investor pada lembaga

kerjasama regional yang dipimpinnya. Hal ini berakibat gamangnya calon investor untuk menjalin kerjasama lebih lanjut (wawancara dengan Manager Sampan). Penilaian ini nampaknya sejalan dengan penilaian responden tentang pemahaman investor pada konsep MR. Sebanyak 71,4 % responden menilai bahwa investor tidak memiliki pemahaman yang memadai pada konsep MR yang diterapkan oleh lembaga kerjasama regional. Hanya 28,6% yang memberikan penilaian bahwa investor memiliki cukup pemahaman tentang konsep MR dalam manajemen lembaga kerjasama regional

Keterlibatan stakeholders dalam menyusun visi, misi, tujuan dan kegiatan. Visi, misi dan tujuan serta program kerja sebaiknya disusun dengan melibatkan secara maksimal berbagai pihak, baik internal pengelola regional manajemen maupun stakeholders lain. Beberapa pihak yang dimintakan pendapat responden atas keterlibatannya dalam penyusunan visi, misi dan tujuan adalah : pelaksana daerah (baik forum regional maupun dewan eksekutif atau sekretariat bersama), pelaku usaha dan investor.

Keterlibatan kabupaten/Kota. Pada umumnya keterlibatan kabupaten/kota dalam penyusunan visi dan misi lembaga kerjasama sudah cukup optimal. hal ini dapat dipahami karena pada masa awal pembentukan, intensitas kelibatan kabupaten/kota masih cukup tinggi.

Keterlibatan Pengelola Lembaga Kerjasama. Keterlibatan pengelola dalam penyusunan secara umum sebenarnya kecil, karena biasanya visi, misi dan tujuan disusun sebelum perekrutan Regional manajer yang direkrut sebelum penyusunan visi, misi pengelola dapat dilibatkan.

Kelibatan Pelaku Usaha. Secara umum pengusaha dan pelaku usaha lokal cukup memadai dalam kelibatannya pada penyusunan visi, misi lembaga kerjasama. hal tersebut diungkapkan oleh 57,1 % responden, sedangkan 42,9 % mempunyai penilaian bahwa kelibatan mereka tidak memadai.

Kelibatan Stakeholders lain. Sama dengan kelibatan pelaku usaha, kelibatan pihak-pihak lain nampaknya cukup memadai, meski ada 42,9 % yang menilai tidak memadai.

Peningkatan kinerja lembaga kerjasama dalam 3 tahun terakhir.

Dinamika lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah dapat diungkapkan dari 4 lembaga kerjasama regional, yakni Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, Sampan ndan Kedungsepur. Dinamika ini terdeteksi dari peningkatan aktivitas, serapan dana untuk kegiatan, investasi, transaksi bisnis, dan manfaat riil bagi daerah

Peningkatan Aktivitas. Responden pada umumnya (57,1%) memiliki penilaian bahwa selama 3 tahun terakhir, terjadi peningkatan kegiatan lembaga kerjasama yang cukup memadai. Namun ada sebanyak 28,6 % yang menilai bahwa peningkatan kegiatan tidak memadai. Bila dicermati lebih lanjut dari kegiatan ke 4 lembaga, hanya Kedungsepur yang belum memiliki peningkatan kegiatan.

Peningkatan Serapan Dana untuk Kegiatan. Serapan dana untuk kegiatan dinilai cukup memadai, namun persentase yang

memberikan penilaian tersebut berkurang dibandingkan dengan penilaian terhadap peningkatan kegiatan. Responden yang memberikan penilaian cukup memadai ada sebanyak 57,1 %. Sementara yang menilai tidak memadai meningkat menjadi 42,9 %.

Peningkatan Investasi. Semua responden sepakat bahwa dalam 3 tahun terakhir peningkatan investasi dari kegiatan lembaga kerjasama regional tidak memadai. Hal ini senada dengan keluhan MR Sampan bahwa umumnya daerah (Kab/Kota) menginginkan *instant result* dari kegiatan regional marketing yang dilakukan lembaga kerjasama regional, sehingga cenderung tidak dapat melihat kemanfaatan investasi langsung dari kegiatan lembaga ini.

Peningkatan Transaksi Bisnis. Penilaian terhadap peningkatan transaksi bisnis dari kegiatan yang dilakukan lembaga kerjasama juga mendapat penilaian hampir sama dari responden. Sebagian besar (85,7%) responden menilai bahwa dalam 3 tahun terakhir peningkatan transaksi bisnis dari kegiatan yang dilakukan lembaga kerjasama regional tidak memadai, hanya 14,3 % yang memberikan penilaian positif.

Peningkatan Manfaat Riil Bagi Daerah. Pada umumnya (57,1 %) responden menilai bahwa dalam 3 tahun terakhir telah terjadi peningkatan manfaat riil yang cukup memadai bagi daerah yang tergabung dalam lembaga kerjasama regional.

Permasalahan Utama Kerjasama Regional. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kerjasama regional antara lain berupa : (i). kekakuan birokrasi. Prosedur birokrasi dalam pemilihan topik yang dikerjasamakan tidak dapat fleksibel, tumpang tindih dalam operasionalisasi kewenangan (mana kewenangan yang menjadi milik kab/kota atau provinsi dan mana kewenangan yang bisa dikerjasamakan), (ii). Komitmen yang belum jelas. Ketidakjelasan tindakan pasca perumusan kerjasama, implementasi kerjasama yang rumit, keberlanjutan kerjasama pasca kegiatan, keterpaduan visi misi dan program antara pemprov dan daerah kab/kota, koordinasi antar instansi terkait, semangat kebersamaan yang belum mantap, pelaksanaan kegiatan yang kurang lancar, dan pola pendanaan yang belum disepakati.

Berbagai hambatan yang telah dapat diidentifikasi di atas, diharapkan oleh kabupaten/kota dapat diperingan dengan fasilitas Pemerintah Provinsi. Beberapa keraguan atas peran provinsi muncul dalam usulan kabupaten/ kota berikut : (i) Peran provinsi harus adil agar ego sektoral dan ego daerah tidak muncul ; (ii). kejelasan batas kewenangan antara prov dan kab/kota; (iii). Pemberdayaan Bakorlin secara optimal; (iv) Provinsi harap berperan aktif saat kerjasama antar kabupaten / kota bersifat antagonis (satu dengan lain berbeda memetik manfaat); (v) Perlu penegasan peran, tugas dan tanggungjawab prov dalam KAD; (vi) Perlunya perhatian provinsi terhadap keberlanjutan program/kegiatan kerjasama antar daerah; (vi). Perlunya dukungan pendanaan bagi KAD yang sudah ada; serta (vii) Perlunya provinsi mendorong terwujudnya implementasi kegiatan yang sudah direncanakan KAD.

Analisis Peta Regionalisasi Dan Lembaga Kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Jawa Tengah pernah dirintis sebanyak 12 regionalisasi (jumlah regionalisasi terbanyak di Indonesia, Informan : Bappenas 2007). Informan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengemukakan bahwa berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah ditetapkan 8 kawasan andalan yang merupakan kawasan strategis pengembangan wilayah. Namun dalam pengembangan potensi daerah kawasan ini masih belum mencapai hasil optimal, sebab penetapan kawasan tersebut hanya sebatas penetapan batas fisik administrasi semata seperti halnya konsep Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) tanpa diikuti dengan suatu pendekatan manajemen pembangunan. Padahal semestinya sistem manajemen inilah yang akan merealisasikan berbagai peluang keterkaitan dan sinergi dalam pengelolaan potensi dan asset daerah. Disamping itu sistem ini pula yang akan menjadi instrumen kerjasama pembangunan antar daerah dalam rangka mendorong perkembangan kawasan secara keseluruhan. Mestinya pembentukan manajemen wilayah (*regional management*) merupakan suatu kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama pembangunan. Konsep ini tidak hanya difokuskan pada satu sektor saja tetapi disesuaikan dengan potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah. Fokus Regional Management adalah sinergi pembangunan antar daerah dengan memberdayakan potensi ekonominya. Apabila melihat konteks Jawa tengah maka sebenarnya wilayah ini cukup strategis sebagai pusat produksi, koleksi, distribusi dan pemasaran barang dan jasa. Secara alami wilayah ini memiliki keuntungan geografis karena menghubungkan dua pusat pertumbuhan nasional yaitu, Jakarta yang di kawasan barat dan Surabaya di kawasan Timur Indonesia. namun wilayah ini relatif tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangganya, dengan demikian pemasaran wilayah menjadi isu strategis dalam setiap upaya pembangunan daerah Jawa Tengah yang salah satunya dengan Konsep Regional Management.

Dari 8 regionalisasi dari RTRW Jateng hanya 3 kawasan regional yang berbentuk sebagai lembaga kerjasama. Ketiganya adalah Barlingmascakeb, Subosukawonosraten dan kedungsepur: Selain ke 3 kawasan tersebut ada satu bentukan di luar pembagian 8 kawasan tersebut, yakni Sampan. Sedangkan 5 kawasan dari 8 kawasan regional lainnya masih dalam kondisi stagnan atau mulai rintisan kembali dengan keanggotaan yang berubah.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa di Jawa Tengah : terdapat 3 (tiga) regionalisasi, yakni regionalisasi berdasar wilayah Bakorlin, regionalisasi berdasarkan perencanaan tata ruang, dan regionalisasi berdasarkan komitmen bersama, yang terinci sebagai berikut :

- a. Berdasarkan wilayah Bakorlin (Badan Koordinasi Lintas Wilayah) ada 3 lembaga formal yang bersifat koordinatif (eks karesidenan)
- b. Berdasarkan Perda Tata Ruang ada 8 wilayah prioritas, dan
- c. Berdasarkan komitmen bersama tanpa dukungan rencana tata ruang ada 1 lembaga kerjasama.

Analisis Dinamika Lembaga Kerjasama Regional. Kuesioner ini hanya diperuntukkan pada daerah-daerah yang tergabung dalam 4 lembaga kerjasama yang ada, yakni : Barlingmascakeb,

Subosukawonosraten, Sampan dan kedungsepur. Dinamika lembaga kerjasama ini nampak dari : penilaian kabupaten/kota pada keberadaan lembaga kerjasama, pemahaman pelaku kerjasama, keterlibatan pada penyusunan visi-misi dan tujuan, dan penilaian atas kinerja lembaga kerjasama dalam 3 tahun terakhir. Bila dicermati dari temuan pada sub bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa :

- a. Secara umum daerah yang terlibat dalam lembaga kerjasama masih memberikan penilaian positif pada lembaga kerjasama yang ada. Hanya 14,29 % yang masih belum puas terhadap kapasitas lembaga kerjasama.
- b. Secara umum pemahaman pelaku kerjasama yang terdiri dari pelaksana daerah, pengelola lembaga kerjasama, pelaku usaha dan investor nampaknya menurun bila dibandingkan skor kapasitas lembaga. Ada sebesar 46,43 % responden yang menyimpulkan bahwa pemahaman pelaku kerjasama pada konsep MR tidak memadai. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berbagai pihak tentang konsep MR meski cukup baik / memadai (53,57 %). dan masih perlu peningkatan karena masih ada 46,43 % responden yang meragukannya.
- c. Secara umum kelibatan berbagai pihak dalam penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga kerjasama regional cukup memadai. Hanya 28,57 % saja yang menilai kelibatan berbagai pihak tidak memadai.
- d. Secara umum dapat dikatakan bahwa meski ada beberapa aspek yang dinilai tidak memadai, secara umum responden yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam lembaga kerjasama regional memberikan penilaian yang cenderung baik, yakni terjadi peningkatan kinerja lembaga selama 3 tahun terakhir. Adapun indikator kinerja yang dinilai tidak terjadi peningkatan memadai meliputi : investasi dan transaksi bisnis.

Analisis Permasalahan Utama Kerjasama Regional. Antisipasi pada berbagai hambatan dan permasalahan di atas, diperlukan pendekatan konsep kelembagaan kerjasama regional yang lebih akomodatif diantaranya : (i). Pendekatan kewilayahan (*regional management*). Kelembagaan ini berfokus : ekonomi (provinsi potensi daerah); (ii). Pendekatan spesifik (sektoral) contoh : pengelolaan sumber daya air, kesehatan, infra struktur (kerjasama 2 atau lebih daerah yang berdekatan, yang memiliki keterkaitan dan kepentingan yang sama, tanpa kelembagaan permanent); (iii). Pendekatan formal yakni : Lembaga koordinatif seperti BKAD, Bakorlin.

Sementara itu, beberapa konsep lembaga kerjasama yang diharapkan dalam kerjasama antar daerah yang berdekatan meliputi : Pengembangan Badan Kerjasama Antar Daerah dan *Regional Management* sebaiknya meliputi Aspek Ekonomis dan aspek pelayanan umum; Model kerjasama pelayanan umum sebaiknya bersifat specific, sektoral / real (jangan makro) dan teknis yang lebih fokus sebagai *subordinate* atau bentukan dari regionalisasi yang ada. Contoh dari model ini adalah kerjasama dalam bentuk pelayanan kesehatan dengan konsep Puskesmas Gratis di daerah perbatasan. Kerjasama sektoral ini diperkuat dengan MOU/Keputusan bersama sektoral/peraturan bersama; Sebagai wujud implementasi

regionalisasi yang ada dapat dibentuk kelembagaan yang operasional, misalnya forum atau PT. Contoh PT Solo Raya yang terjamin transparansi dan akuntabilitasnya; Pembentukan kerjasama diolakukan dengan tahapan yang jelas. Prioritas bidang kerjasama/sector perlu ditentukan lebih dahulu sebelum membentuk *Regional Management*; Kerjasama dengan pihak ketiga sebaiknya dilakukan setelah penentuan prioritas kebutuhan; Diperlukan fasilitasi dari pemerintah (pusat, provinsi) untuk implementasi kerjasama antar daerah, dalam bentuk regulasi KAD (Perda), dukungan pendanaan, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan; Komitmen pengambil keputusan merupakan kunci keberhasilan KAD; Struktur kelembagaan sebaiknya fungsional dan bukan hirarki; Adanya perangkat organisasi/kelembagaan yang jelas pengelola, staf pendukung kantor/sekretariat, pembiayaan operasional, sistem/mechanisme pengambilan keputusan yang disepakati (rapat-rapat); Daerah yang bekerjasama memberikan *sharing* pendanaan dan diperkuat dengan bantuan provinsi sebagai *stimulan*; Peran masing-masing daerah dalam kelembagaan kerjasama disepakati bersama (pengurus organisasi bergiliran); Diperlukan pengembangan sistem informasi : *web site*, laporan rutin rapat koordinasi rutin yang terstruktur.

Penutup

Kesimpulan. a) Peta regionalisasi didasarkan pada pendekatan perencanaan tata ruang yang telah diperdakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 8 (delapan) region. Delapan region, 3 (tiga) diantaranya berkembang menjadi kerjasama regional, yakni : Barlingmascakeb, Subosukawonosraten dan Kedungsepur. b) Lembaga Kerjasama Regional di Jawa Tengah saat ini terdiri dari 3 (tiga) region hasil regionalisasi tata ruang ditambah 1 region hasil inisiatif daerah (Kab/Kota) sendiri, yakni Sapta Mitra Pantura (Sampan). c) Permasalahan pokok kerjasama regional di Jawa Tengah antara lain: 1) cakupan kerjasama baru sebatas regional marketing, sementara kebutuhan kerjasama selain regional marketing juga pelayanan umum, 2) Format kelembagaan masih menjadi agenda pencarian dari beberapa lembaga kerjasama regional yang ada, dengan 2 (dua) pilihan yakni : *intergovernmental relation (IGR)* seperti yang dikembangkan oleh Barlingmascakeb, Subosukawonosraten dan Sampan, 3) Adanya inkonsistensi dalam kebijakan dari pusat sampai daerah dengan adanya dukungan kuat dari undang-undang 32 tahun 2004, kemudian dilanjutkan oleh Surat Edaran dan kebijakan pendukung lainnya, tetapi dimentahkan dengan ketiadaan pos anggaran pada Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran. Diperlukan insisiasi dan fasilitasi pemerintah Provinsi dengan bekerjasama dengan *stakeholders* dalam perintisan kerjasama regional bagi daerah yang membutuhkan. Selain itu, diperlukan juga pengembangan cakupan kerjasama tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga manajerial, bukan sebatas regional marketing, tetapi juga mencakup pelayanan umum. Kemudian, diperlukan juga desain kelembagaan yang tegas yang dapat dikembangkan sebagai pedoman umum pembentukan kerjasama regional, baik dari tingkat pusat

maupun provinsi sehingga terdapat ketegasan bagi daerah untuk menyelenggarakan kerjasama. Yang terakhir, perlunya dukungan peraturan yang tegas terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk operasionalisasi kerjasama regional sehingga daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan mantap.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdurahman, Benjamin (2005). *Pemahaman Dasar Regional Management & Regional marketing, Instrumen Strategis Pembangunan Wilayah dan Kota dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan implikasi Pelaksanaan otonomi Daerah*, Semarang : IAPJateng,
- Alison, G.T., (1971). *Essence of Decisionmaking: Expalining The Cuban Missile Crisis.*, Boston : Little Brown
- AlGore, (1994). *Commons Sense Government, Works Better and Cost less, The Third Report of The National Performance Review*
- Askenas, Ron; Ulric, Dave; Jick, Todd, dan Kerr Steve (1995). *The Boundaryless Organization, breaking the Cain of organization structure*, San Francisco CA : Jossy-Bass Publisher .
- Amal, Ichlasul (1992). *Globalisasi, Demokrasi, dan Wawasan Nusantara : Perspektif Pembangunan Jangka Panjang, dalam "Wawasan Nusantara Indonesia Menghadapi Globalisasi*, Pusat kajian Kebudayaan Univ. Bung Hatta.
- Bungin, Burhan (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Blair, John P. (1991). *Urban and Regional Economics*, Homewood, IL : Irwin
- Dahuri, Rohmin dan Iwan Nugroho, (2004), *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta
- Denhard, Janet V., and Denhard, Robert B.V., (2003), *The New Public Service : Serving not Steering*, M.E. Sharpe Inc., New York
- Dunleavy, P, (1980), *Social and Political Theory and the Issue in Central-Local Relations'* dalam Jones, GW (1980, ed), *New Approaches to the study of Central-Local Government Relationships*, Gower & SSRC, Aldershot, Hant
- Dwijanto, Agus, ed., (2006), *"Mengapa Pelayanan Publik?" (dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Friedman, John dan Mike Douglas, (1996) *"Agropoitan Development : Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia"*, dalam buku *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Moeljarto Tjokrowinoto, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Glasson, John, (1974), *An Introduction to Regional Planning*, London : Hutchinson
- , (1983), *An Introduction to Regional Planning: Concepts*,

- Theory and Practice*, Chapter 2, "The Region in Regional Planning,"
- Huberman, A Michael and Mathew B Miles, (1994). *Data Management and Analysis Methods* dalam Norman, K Denzin dan Lincoln Yvonna S (Eds.), *Handbook of Qualitative, Qualitative Research*, California : Sage Publication
- Hirst, Paul dan Grahame Thompson (2001). *Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Inglesias, Gabriel U. (1987). *Regionalization and Regional Development in Philippines*, Manila. UP - CPA.
- K.S., Jomo and Khoo Khay Jin (2002). *Globalization And Its Discontents, Revisited*, New Delhi, India : Tulika Book.
- Keban, Yermias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.
- Kunarjo, (2002), *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia UI Press,
- Korten, David C., and Rudi Klaus (1984). *People Centered Development*, Kumarian Press.
- Madeley, John (1999). *Big Business, Poor Peoples, The Impact of Transnational*
- Markusen, Ann (1987) "Alternative Approaches to the Study of Regions and Regionalism," Ann Markusen (ed.), *Regions*, Totowa, N.J.: Rowman & LittleField
- Maddick, (1963), *Democracy, Decentralization and Development*, Bombay, India : Asia Publishing House.
- Miles Matthew B; Huberman Michael A (1984). *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills : Sage Publications.
-(1989) *Oxford Advance Learner's Dictionary*, Oxford : Oxford University Press.
- OECD, (1991), *public Management Developments: Survey, 1991*, Paris : OECD,
- Parsons, Wayne (2001). *Public Policy : An Introduction to the Teory and Practice of Pubis Análisis*, New York : Edward Elgar Publishing Ltd
- Richardson, H.W. (1969). *Regional Economics*, London : Weidenfeld & Nicholson,
-(1977). *City Size and National Spatial Strategies in Developing Countries*, World Bank Staff Working Paper No. 252, World Bank, Washington, DC.
- Rondinelli, D., and Chema, S. (1983). *Implementing Decentralisation Policies*, London : Sage.
- Rouke, Francis E. (1965). *Bureucratic Power in Natioanal Politics*, Little Brown, Boston, MA.
- Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan*

- Otonomi Daerah, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Rustiadi, E., et. All., (2004). *Perencanaan Pengembangan Wilayah Konsep Dasar dan Teori*, Bogor : Faperta-IPB,,
- Savas, E., S., (1987). *Privatization, the key to better government*, New Jersey : Chatman House Publisher, Chatham,
- Sinambela, Lijan Poltak, (2006). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sihotang, Paul (1977). *Pengantar Perencanaan Regional (Terjemahan Paul Sihotang)*Jakarta : PPFU-UI.
- Thoha, Miftah (2007). *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Warsito (2006). *Administrasi Publik baru Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- van der Heijden, Kees. *Scenarios, (1996). The Art of Strategic Conversation*. Chichester & New York: John Wiley & Sons
- Weichhart P. (2002). *Globalization Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Regionen*. In : H. DACHS und R.FLOIMAIR, Hrsg., *Salzburger Jahrbuch fur Politik 2001*. Salzburg (Schrittenreihe des landespressebueros, sunderplublikationen, Nr. 180)
- Winarno, Budi (2004). *Globalisasi, Wujud Imperialisme baru, Peran Negara dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Tajidu Press.
- Whyte, W.F. (1955). *Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum*, Chicago : University of Chicago Press
- Widarta, I., (2005). *Cara Mudah Memahami Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Pondok Edukasi.
- Yin, Roberth K. (1995). *Studi Kasus, Desain dan Methode*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2001) Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka.

Laporan Penelitian/Buku Pedoman/Jurnal/paper :

- BAPPEDA Jateng, (2005), *Pedoman Regional Economic Development Strategic Programs (REDSP)*, Semarang
- BPS Provinsi Jateng, (2007), *Jawa Tengah dalam Angka 2007*, Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang
- Djohan, Djohermansyah, (2002), *Fenomena Etnosentrisme Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (makalah dalam Workshop "Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, UNDIP, Semarang
- McGuire, Michael, (2006), *Intergovernmental Management : A View From The Bottom*, *Public Administration Review* 66 (5) Page 677-679, September-October 2006

- Nijkamp, Peter, Han de Graff & Edward Sigar, (1981). *A Multidimensional Analysis of Regional Infrastructure and Economic Development*, Paper presented at the conference on "Structural Economic Analysis and Planning in Time and Space", Umeoa, Sweden, June.
- O'Toole, Laurence J., Jr., Meier, Kenneth J. (2004). *Journal of Public Administration Research and Theory*, 01 - Oct - 2004
- Pratikno, (2002). *Pengelolaan Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, makalah dalam Workshop tentang "Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah", AIPI, *Partnership Government Reform in Indonesia* dan UNDIP di Semarang, 25-27 Maret 2002
- Steuer, James A., (1992). *Intergovernmental Management in Revolutionary Era*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, J-PART, Vol.2, No.3 (Jul., 1992) p.347-350
- Warsono, Hardi, (2004). Resolusi konflik Menuju Kerjasama Antar Kota di Era Otonomi Daerah, *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol.1 No. 1, Januari 2004, Semarang: MAPUNDIP.
- , (2004). Implementasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat (Studi Kasus Kota Makassar), *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol.1 No. 3, September 2004, Semarang: MAPUNDIP.

Web site:

<http://mpwk.undip.ac.id/seminar/agustus2004/pdf/ruchyatdeni.pdf>, 23 Agustus 2006

www.eforessee.info/files/general/foren-manual.pdf. FOREN Network (*Foresight for Regional Development*), 2001, "A Practical Guide to Regional Foresight", European Commission, , 24 Agustus 2006

[http://les1.man.ac.uk/PREST/euforia/documents/EFL Handbook April 2003.pdf](http://les1.man.ac.uk/PREST/euforia/documents/EFL%20Handbook%20April%202003.pdf), Miles, Ian et. al., 2002, "Handbook of Knowledge Society Foresight", PREST, FFRC, 15 Oktober 2006

<http://www.gbn.com>, Scarce, D.; Fulton, K., 2004, "What if? The Art of Scenario Thinking for Nonprofits", Global Business Network, 24 Januari 2007

[http://www.Pacific Link - Kolom Pakar/ J_Soedradjad Djiwandono.mht](http://www.PacificLink-KolomPakar/J_SoedradjadDjiwandono.mht), 2 Pebruari 2008

<http://www.salga.net>, *South African Local Government Association*, 10th Anniversary, 24 Juni 2008

http://www.citymayors.com/government/sa_loegov.html, Swift, Nick, 2008, , *Local Government in South Africa: Building a new*

Structure after apartheid, 23 Juni 2008

<http://www.cor.ip.lu/COR cms>, Ueropian Union Committee of The Regions, 23 Juni 2008

<http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index en.htm>, The Committee of The Regions, 23 Juni 2008

http://lcp.org.ph/au_mandate.htm, City Mayors LCP Secretariat, 23 Juni 2008

http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-2364707/Public-management-in-intergovernmental-networks.html

<http://www.unescap.org/huset/lgstudy/new-countrypaper/Rok.pdf>, Country Reports on Local Government Systems: Republic of Korea, 24 Juni 2008

<http://www.soundtransit.org/x2603.xml>, Sound Transit District, 24 Juni 2008